

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas daerah dapat digambarkan secara grafis sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
*Skema Penjabaran Visi Misi RPJMD 2013-2017*



Sumber : RPJMD 2013 - 2017

Penjelasan untuk masing-masing elemen dapat diuraikan sebagai berikut :

## A. VISI DAN MISI

### 1. VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah **“JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**.

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

- a) Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- b) Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- c) Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- d) Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

### 2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
- c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.

- d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
- e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Aparatur, dengan penjelasan sebagai berikut :

**a. Misi Pertama: Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Bahwa untuk misi kesatu, pada kalimat "Jakarta kota modern yang tertata rapi", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan :

- 1) Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa serta meminimalisir kawasan industri yang tidak bersifat industri teknologi tinggi (*hi-tech*).
- 2) Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, bandara, pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), *Transit Oriented Development* (TOD), pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase, pengembangan sistem air minum beserta sumber air bakunya, pengelolaan air limbah, pemanfaatan air tanah, permukiman dan energi.
- 3) Lingkup sistem distribusi logistik meliputi pengembangan terminal agro, terminal beras dan bahan pokok lainnya.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindari dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan

pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya Kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) yang memperhatikan tiga hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan Kota Jakarta sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun Kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan kedudukan kota, differensiasi dan *branding* atas produk-produk yang dimiliki Kota Jakarta. Selain itu pembangunan Kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten.

Sementara untuk kalimat "konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan penataan ruang yang merupakan penguatan Pilar Aparatur yang difokuskan pada bersih dan transparannya aparat dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan ruang serta *enforcement* terhadap pelanggaran peraturan tata ruang dan bangunan mengingat pengembangan wilayah kota yang harus mengacu pada rencana pola dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas.

Pengendalian pemanfaatan ruang kota terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan ruang kota yang tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya perwujudan Kota Jakarta sebagai kota yang kompak (*compact city*) akan terus didorong melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang terpadu dan pengembangan kawasan-kawasan *transit oriented development* di sepanjang jalur transportasi massal.

**b. Misi Kedua: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain**

Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Lingkungan Hidup yang berarti akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat dan infrastruktur pengelolaan sampah dan air.

Meskipun Kota Jakarta telah berkembang pesat sebagai pusat perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Berbagai masalah menahun yang masih sering terjadi antara lain banjir, kemacetan, permukiman kumuh, dan sampah. Kegagalan mengatasi masalah di atas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota.

Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jakarta karena hal ini dapat mengakibatkan dampak besar dan merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi di Kota Jakarta selain disebabkan karena faktor alam juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di sungai dan selokan dan membangun hunian di bantaran sungai. Selain itu pemeliharaan saluran drainase juga dirasakan masih kurang optimal sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran air di sungai dan saluran.

Kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta semakin lama semakin parah. Hal ini disebabkan kapasitas jalan yang tidak mencukupi, keterbatasan ketersediaan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi, serta ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tidak dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai sehingga kelancaran lalu lintas menurun. Titik-titik

kemacetan baru, muncul di hampir seluruh wilayah Jakarta setiap tahunnya. Di sisi lain, pengembangan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal dirasakan masih sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Kemacetan yang terjadi di Jakarta telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian kota.

Kota Jakarta juga masih dihadapkan pada masalah permukiman kumuh dan kualitas lingkungan permukiman kota yang semakin menurun. Penanganan permukiman kumuh merupakan masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi saat ini menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan tertata. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak saja menjadi tugas dari pemerintah daerah, tapi juga merupakan tugas dari seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara terpadu dan berkelanjutan. Selama ini pengelolaan sampah masih difokuskan pada pengelolaan konvensional, sehingga kedepan perlu diupayakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan canggih, agar sampah yang ada dapat pula dimanfaatkan untuk didaur ulang, digunakan kembali serta sebagai alternatif untuk menghasilkan sumber energi.

Kebutuhan sumber air baku yang masih tergantung dari Waduk Jatiluhur dan dari Tangerang dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan mencari sumber-sumber air baku yang terbarukan.

Pemerintah Kota Jakarta telah berkomitmen untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang selalu terjadi dan merugikan masyarakat melalui pembangunan kota yang berketahanan, antara lain dengan membangun tanggul raksasa dalam konsep *Jakarta Coastal Development Strategy* (JCDS), dukungan anggaran tahunan yang signifikan, serta menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya.

**c. Misi Ketiga: Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota**

Bahwa untuk misi ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya dan peningkatan ruang publik berupa taman, taman interaktif dan hutan kota.

Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota. Ketersediaan hunian dan lingkungan permukiman yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Masalah utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat di Jakarta adalah keterbatasan lahan, sehingga penediaannya belum dapat sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, kemauan masyarakat untuk tinggal di rumah susun juga masih rendah.

Pembangunan Kota Jakarta kedepan harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian dan ruang publik yang terjangkau bagi warga kotanya. Pemerintah Kota harus mengembangkan skema-skema penyediaan rumah yang layak dan terjangkau baik dengan dukungan program dan kegiatan daerah maupun kerjasama dengan pemerintah pusat dan perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta penyediaan ruang publik yang memadai.

**d. Misi Keempat: Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota**

Bahwa untuk misi keempat, pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah,

harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya Kota Jakarta seperti penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, revitalisasi Kota Tua dan kawasan budaya, serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Karakter Budaya Betawi juga terus diperkuat melalui penerapan dalam arsitektur bangunan dan karakter kota, pengembangan pusat-pusat dan Kawasan Budaya Betawi.

Kota Jakarta selain mempunyai fungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan politik, sosial dan budaya. Dengan fungsinya yang beragam, Kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Jakarta, sehingga pertambahan penduduk Kota Jakarta akibat migrasi terus meningkat.

Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu.

Heterogenitas masyarakat Jakarta selain dapat menjadi potensi pembangunan, dapat pula dipandang sebagai pemicu terjadinya konflik yang bersifat primordial atau antar kelompok dan golongan. Sebagian dari mereka sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang dapat berkembang menjadi perkelahian massal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan



latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan perkuatan daya saing wilayah yang di dukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

**e. Misi Kelima: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik**

Bahwa untuk misi kelima, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/ kabupaten dan provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu

upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (*recruitment*) secara online, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara online melalui sistem informasi.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN PER MISI**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

**a. Misi Pertama : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah**

**1) Tujuan**

- a) Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis Kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- b) Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

**2) Sasaran**

- a) Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.
- b) Berkembangnya kawasan-kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah.
- c) Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota.
- d) Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal.
- e) Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota.
- f) Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik.
- g) Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota.
- h) Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
- i) Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten.

**b. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain**

**1) Tujuan**

- a) Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun.
- b) Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

**2) Sasaran**

- a) Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.
- b) Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ ke dalam kota.
- c) Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya.
- d) Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal.
- e) Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota.
- f) Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman.
- g) Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah Kota Jakarta.
- h) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

**c. Misi Ketiga : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota**

**1) Tujuan**

Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

**2) Sasaran**

- a) Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat.
- b) Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung).
- c) Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta.

**d. Misi Keempat : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota**

**1) Tujuan**

- a) Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal.
- b) Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.

**2) Sasaran**

- a) Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas.
- b) Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah Kota Jakarta.
- c) Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota.
- d) Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota.
- e) Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan.
- f) Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat.
- g) Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan.

- h) Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA).
- i) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

**e. Misi Kelima : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik**

**1) Tujuan**

- a) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan.
- b) Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat.
- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat.
- d) Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.

**2) Sasaran**

- a) Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
- b) Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya.
- c) Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis.
- d) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
- e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat.
- f) Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- g) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat.
- h) Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
- i) Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara misi dengan strategi dan arah kebijakan selama RPJMD 2013-2017 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

*Tabel II.1*  
*Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta*

### MISI 1 : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

NO	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder	1	Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, dan Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder, yang berwawasan lingkungan antara lain melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda
2	Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis	1	Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perdagangan : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Pengembangan Kawasan Tanah Abang,

			<p>Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Pengembangan Kawasan Manggarai, Pengembangan Kawasan Jatinegara, Pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran, Pengembangan Kawasan Dukuh Atas, Pengembangan Kawasan Mangga Dua, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Barat, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Timur, Pengembangan Kawasan Pulau Tidung</p>
		2	<p>Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan dan Urusan Lingkungan Hidup : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai melalui Persiapan pembangunan <i>Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS)/ National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i></p>
3	<p>Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal</p>	1	<p>Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : mengembangkan kawasan terpadu (superblok) multifungsi dan multi strata masyarakat melalui pembangunan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> di sepanjang koridor MRT</p>
		2	<p>Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong kawasan peremajaan kota yang vertikal, kompak dan terkait jaringan transportasi massal</p>
4	<p>Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan</p>	1	<p>Urusan Penataan Ruang dan Urusan Koperasi dan UKM : Mengefektifkan aturan penyediaan ruang bagi ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan serta memberikan pinjaman modal bergulir</p>
5	<p>Pembangunan mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL)</p>	1	<p>Urusan Koperasi dan UKM : Membangun mall khusus bagi pedagang kaki lima pada lokasi tanah milik pemerintah</p>
6	<p>Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggeser PKL</p>	1	<p>Urusan Perdagangan : Memperbaiki pasar-pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima</p>
7	<p>Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung</p>	1	<p>Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : membantu pembentukan asosiasi/ kelembagaan pedagang informal</p>



	formalisasi dari ekonomi informal	2	Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : mengadakan pelatihan untuk manajemen usaha kecil
8	Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar	1	Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok
9	Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif	1	Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan distribusi dan stok pangan di tingkat kelurahan
10	Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum	1	Urusan Penataan Ruang, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengintegrasikan jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan serta Penataan dan pengelolaan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>
11	Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien	1	Urusan Penataan Ruang dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral : Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
		2	Urusan Energi dan Sumberdaya mineral : Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)
12	Penataan jaringan utilitas perkotaan	1	Urusan Pekerjaan umum : Penataan dan pembangunan jaringan <i>ducting</i> utilitas
13	Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang	1	Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan forum komunikasi publik terkait penataan ruang secara rutin dan terjadwal serta melibatkan masyarakat luas, pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui Rencana Penataan Ruang pada media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui

		2	Urusan Penataan Ruang : Meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk penyusunan masterplan penanganan permasalahan tata ruang.
14	Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	1	Urusan Penataan Ruang : Mengendalikan pembangunan sesuai dengan aturan tata bangunan dan lingkungan yang telah ditentukan melalui pelaksanaan pemberian saran teknis terhadap rencana pembangunan gedung dan bangunan lainnya, dan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai ketentuan
		2	Urusan Penataan Ruang : Melakukan kajian dan peninjauan kembali terkait mekanisme dan tata cara perijinan pemanfaatan ruang
		3	Urusan Penataan Ruang : menerapkan pendekatan <i>zoning regulation</i> pada kawasan-kawasan cepat berkembang
		4	Urusan Penataan Ruang : Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
15	Pengembangan sistem informasi spasial	1	Urusan Penataan Ruang : menerapkan sistem informasi spasial berbasis web.

**MISI 2 : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi	1	Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan terminal antara lain melalui Revitalisasi Terminal Bus Dalam Kota
		2	Urusan Perhubungan : Melakukan pengembangan pelabuhan melalui pengembangan angkutan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu
2	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal	1	Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis rel melalui Pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan Tahap I (Lb Bulus - Bunderan HI), Pembangunan sebagian MRT Koridor Selatan-Utara Tahap II (Bunderan HI - Kampung Bandan), dan persiapan

			pembangunan MRT Koridor Barat-Timur
		2	Urusan Perhubungan : Mengembangkan <i>Light Rapid Transit</i> (LRT) melalui Pembangunan Koridor <i>Green Line</i> dan <i>Blue Line</i> , sesuai RTRW
		3	Urusan Perhubungan : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal Laut dan Sungai melalui pembangunan dermaga penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu, pengadaan armada kapal penyeberangan, standarisasi keamanan dan keselamatan kapal penyebrangan tradisional, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal laut dan sungai
		4	Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan Angkutan Massal Berbasis Jalan atau BRT(Bus Rapid Transit) melalui Pembangunan Koridor Busway baru yaitu Koridor 13 (Ciledug-Blok M), Koridor 14 (UI-Manggarai), dan Koridor 15 (Pondok Kelapa – Blok M), Pembangunan Busway Koridor Integrasi Jabodetabek; Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, dan Jakarta-Depok/ Bogor, Pengembangan Layanan <i>Feeder</i> Busway, Penambahan Armada Bus Busway dan Bus <i>Feeder</i> Busway serta Peningkatan profesionalisme lembaga pengelola Busway
		5	Urusan Perhubungan : Meningkatkan kelembagaan pengelolaan Busway
		6	Urusan Perhubungan : Melakukan Restrukturisasi Trayek Angkutan Umum
3	Penataan Angkutan Umum Reguler	1	Urusan Perhubungan : Melakukan peremajaan bus angkutan umum reguler melalui pengadaan bus baru untuk menggantikan bus lama/ bus yang tidak layak jalan
		2	Urusan Perhubungan : Mendorong percepatan transformasi bentuk kepengusahaan angkutan umum dari perorangan menjadi Bahan Usaha
4	Pengendalian dan Keselamatan Transportasi	1	Urusan Perhubungan : Mengembangkan ITS ( <i>Intelligent Transport System</i> ) melalui Pengembangan ITS di koridor ekonomi strategis serta mengkaji opsi-opsi pengendalian arus kendaraan pribadi, angkutan kota dan truk di dalam kota
		2	Urusan Perhubungan : Melakukan kajian

			menyeluruh penyebab kemacetan untuk membenahan titik-titik rawan kemacetan
		3	Urusan Perhubungan : Menerapkan manajemen/ pembatasan lalu lintas antara lain melalui Penerapan <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP), teknik-teknik <i>traffic restraint</i> lainnya, dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi
		4	Urusan Perhubungan : Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye sadar tertib lalu lintas
5	Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas	1	Urusan Perhubungan : Membangun fasilitas/ sarana pejalan kaki dan jalur sepeda terutama pada koridor angkutan umum, jalan utama dan kawasan pemukiman
6	Penataan sistem parkir	1	Urusan Perhubungan : Mengembangkan sistem parkir yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai melalui Pengembangan sistem parkir <i>online</i>
		2	Urusan Perhubungan : Menerapkan sewa parkir tinggi dan progressive
		3	Urusan Perhubungan : Menata parkir <i>off street</i> dan <i>on street</i>
		4	Urusan Perhubungan : Mengembangkan fasilitas <i>park and ride</i> di stasiun dan terminal
		5	Urusan Perhubungan : Mengembangkan taman dan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan
7	Pengembangan simpang tak sebidang	1	Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan Pembangunan <i>flyover</i> dan <i>underpass</i>
8	Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan	1	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta memperlebar lahan badan jalan di titik <i>bottleneck</i>
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Pengembangan jalan arteri antara lain melalui pembangunan jalan <i>missing link</i> , dan pengembangan jalur khusus untuk angkutan massal pada jaringan

			jalan arteri layang
		3	Urusan Pekerjaan Umum : Menunjang pengembangan ruas jalan tol dalam kota
9	Pengembangan sistem tata air yang terpadu	1	Urusan Pekerjaan Umum : Menyelesaikan Kanal Banjir Timur melalui pembebasan lahan dan pembangunan jalan inspeksi KBT
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung Program Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)
		3	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung Penataan Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain
		4	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan pembebasan lahan dan penyiapan LARAP untuk mendukung penataan kapasitas Kali Ciliwung
		5	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas Cakung <i>Drain</i> , Kali Sunter dan Kanal Banjir Timur di kawasan aliran timur serta penataan Kali Cideng
		6	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Membangun sarana dan prasarana sumberdaya air serta melakukan persiapan pembangunan <i>Giant Sea Wall</i> dalam konteks <i>Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS)/ National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i>
10	Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase	1	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui normalisasi dan penataan sempadan sungai dan saluran
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembuatan sodetan sepanjang Sungai Ciliwung sampai Kanal Barat/ Timur
		3	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas situ, waduk dan embung melalui pembebasan, pembangunan dan pemeliharaan situ, waduk dan embung
		4	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase kota antara lain melalui peningkatan drainase terutama di pusat kota dan pengadaan alat berat serta alat angkut
		5	Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembangunan terowongan bawah tanah multifungsi ( <i>deep tunnel</i> ) melalui investasi

			dari pihak swasta murni
		6	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem polder
11	Pemeliharaan sarana prasarana drainase	1	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan pengerukan sungai dan saluran termasuk pengerukan Bendungan Katulampa
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan pengerukan situ, waduk dan embung
		3	Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase
		4	Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembersihan sungai dan saluran
12	Konservasi sumberdaya air	1	Urusan Pekerjaan Umum : Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk tangkapan air di hulu
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Meminimalkan <i>run-off</i> air hujan melalui pembangunan sumur resapan dan lubang biopori
13	Pengendalian banjir akibat air laut pasang	1	Urusan Pekerjaan Umum : Mengoptimalkan upaya adaptasi terhadap air laut pasang melalui pembangunan tanggul pengaman pantai dan penahan air laut pasang
14	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat	1	Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat
15	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat	1	Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman antara lain melalui Pembangunan IPAL Komunal, sosialisasi penggunaan <i>septic tank</i> standar lingkungan hidup, dan pembangunan/ peningkatan IPAL sistem setempat
16	Pengembangan sistem air minum perpipaan	1	Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan di seluruh DKI Jakarta melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian ke Jakarta, pengembangan sumber air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan, pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih perpipaan yang dapat langsung diminum di kawasan tertentu dan pembangunan pipa transmisi air

			minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang
17	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Urusan Pekerjaan Umum : Menyediakan prasarana sarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan antara lain melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS sesuai standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di kali/ sungai dengan pemasangan sistem saringan sampah otomatis pada batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain dan pada setiap batas wilayah kota administrasi serta peremajaan truk angkutan sampah
		2	Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pelayanan persampahan melalui swastanisasi kebersihan, dan kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan ITF dan TPST
		3	Urusan Pekerjaan Umum : Memperluas tanggung jawab stakeholder antara lain melalui penggalangan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pengelolaan persampahan
18	Penerapan Konsep 3R	1	Urusan Pekerjaan Umum : Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/ hulu melalui pembangunan sentra 3R/ pusat daur ulang, pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, dan pengembangan jejaring kerja bank sampah
19	Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara	1	Urusan Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran udara melalui pemantauan kualitas udara, pembinaan stakeholder melalui program PROPER dan SUPER, penegakan hukum terhadap pencemaran udara, peningkatan penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kawasan Dilarang Merokok dan Uji Emisi
		2	Urusan Lingkungan Hidup : Menurunkan emisi gas rumah kaca antara lain melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor industri, transportasi, dan pemantauan dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca
20	Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air	1	Urusan Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran air antara lain melalui pemantauan kualitas air, pembinaan

			masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air, dan penegakan hukum terhadap pencemaran air serta membentuk dan memperkuat komunitas pencinta sungai
21	Menurunkan beban pencemaran tanah	1	Urusan Lingkungan Hidup : Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya.
22	Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana	1	Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan sistem peringatan dini bencana
		2	Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana
		3	Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan kerjasama dengan swasta untuk penyediaan gudang <i>buffer stock</i>
		4	Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan pelatihan dan <i>evacuation drill</i>
23	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana	1	Urusan Otonomi Daerah: Pembangunan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
		2	Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan pembangunan instalasi <i>hydrant</i> di kawasan permukiman padat/ rawan kebakaran

**MISI 3 : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa	1	Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan superblok rumah susun sewa murah yang dilengkapi pasar, sarana kesehatan dan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat
2	Pengembangan rumah susun sewa	1	Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan rumah susun sewa pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik pemda atau konsolidasi lahan dan bangunan
		2	Melaksanakan pendampingan masyarakat calon penghuni rumah susun
3	Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi	1	Urusan Perumahan Rakyat : Mengendalikan pembangunan rusunami dan apartemen bersubsidi antara lain melalui penyelesaian pembangunan rumah



			<p>susun dan mempercepat proses penghunian rumah susun serta sosialisasi penyuluhan dan bimtek tentang cara dan etika tinggal dihunian vertical</p> <p>2 Urusan Perumahan Rakyat : Melakukan <i>study</i> dan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak serta memfasilitasi pembentukan dan penguatan asosiasi penghuni apartemen</p>
4	Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta	1	<p>Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan perbaikan rumah susun sewa yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta</p>
5	Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota	1	Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai
		2	Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik
		3	Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW- RW Kumuh
6	Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	1	<p>Urusan Lingkungan Hidup : Menambah RTH publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH pPublik</p> <p>2 Urusan Lingkungan Hidup : Mengembangkan RTH privat antara lain melalui penerapan regulasi untuk penambahan RTH privat, penyediaan lahan minimal untuk hutan kota dan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan konservasi flora dan fauna</p>
7	Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik	1	<p>Urusan Lingkungan Hidup : Membangun dan mengembangkan taman, taman interaktif dan hutan kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana rekreasi budaya betawi, sarana penyaluran kreativitas atau <i>creative public space</i> serta berfungsi sebagai daerah resapan air</p>

**MISI 4 : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya	1	Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan budaya betawi dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi alkulturasi budaya nusantara dan budaya Betawi
2	Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional	1	Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event budaya nasional dan daerah antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara
3	Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu	1	Urusan Kebudayaan : Melaksanakan pembangunan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu dan peningkatan pemanfaatan balai kesenian daerah di lima wilayah
		2	Urusan Kebudayaan : Mengembangkan kawasan strategis budaya provinsi di Kota Tua, Taman Ismail Marzuki, Jatinegara dan Situ Babakan
		3	Urusan kebudayaan : Meningkatkan interaksi dan komunikasi budayawan dan seniman, dan antara budayawan dan seniman dengan masyarakat
4	Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta	1	Urusan Kebudayaan : Menata fisik lingkungan kawasan Kota Tua Jakarta melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
		2	Urusan Kebudayaan : Melakukan kerjasama dengan pemilik bangunan/ gedung dan memberdayakan masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan kota tua sebagai destinasi wisata dan benda cagar budaya
5	Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi	1	Urusan Perumahan : Menata gedung-gedung pemerintahan yang bernuansa budaya betawi
		2	Urusan Perumahan : Membangun Masjid Raya bernuansa Betawi di Jakarta Barat
		3	Urusan Perumahan Rakyat : Menerapkan aturan bangunan/ gedung bernuansa budaya Betawi

6	Penyelenggaraan event-event kebudayaan	1	Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan karnaval dan festival budaya di lima wilayah
		2	Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event-event budaya Betawi secara reguler
7	Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian	1	Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan aktivitas dan eksistensi sanggar budaya
		2	Urusan Kebudayaan : Memfungsikan Balai Rakyat di kecamatan sebagai pusat kegiatan sosial-budaya komunitas kecamatan
8	Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal	1	Urusan Ketenagakerjaan : Memberikan jaminan sosial khususnya bagi pekerja informal melalui penerapan asuransi kesejahteraan sosial bagi pekerja informal dengan sistem <i>cost sharing</i>
9	Pengembangan sarana dan prasarana OR di seluruh wilayah	1	Urusan Olahraga dan Pemuda : Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda melalui penambahan jumlah dan peningkatan fungsi gelanggang remaja sebagai sarana untuk aktualisasi aktivitas seni-budaya pelajar, remaja dan mahasiswa dan penambahan jumlah dan peningkatan fungsi gelanggang olahraga sebagai media pengembangan dan pembinaan olahraga
10	Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja	1	Urusan Ketenagakerjaan : Meningkatkan kurikulum pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		2	Urusan Ketenagakerjaan : Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
11	Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)	1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan harmonisasi masyarakat dalam kemajemukan antara lain melalui pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar Suku, Agama dan Ras (SARA)
12	Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam	1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan : Melakukan

	meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota		pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berperilaku budaya yang tertib, disiplin, ramah, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara ketentraman kota.
		2	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota
		3	Urusan Otonomi Daerah: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan

**MISI 5 : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	1	Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan penguatan kelembagaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
		2	Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan
		3	Urusan Otonomi Daerah : Menata kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
2	Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel	1	Urusan Otonomi Daerah : Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi
3	Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Urusan Otonomi Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan

			sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan
		2	Urusan Otonomi Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan <i>online</i> sistem pajak daerah
		3	Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD antara lain melalui pengelolaan BUMD dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, dan penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap manajemen BUMD, serta divestasi atau likuidasi terhadap perusahaan daerah yang belum membaik kesehatannya.
		4	Urusan Penanaman Modal : Meningkatkan investasi daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip <i>good governance</i>
		5	Urusan Perindustrian : Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan dan peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri kreatif dan kompetitif
4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan	1	Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
5	Pengembangan sistem <i>reward and punishment</i> dalam pengembangan sumber daya manusia	1	Urusan Otonomi Daerah : menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> yang adil dan sesuai dengan karakteristik organisasi
6	Proses pengisian jabatan secara terbuka	1	Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan lelang jabatan
7	Peningkatan kepedulian masyarakat pada pembangunan politik dan demokrasi	1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan politis dan demokrasi
8	Peningkatan kapasitas dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi	1	Urusan Otonomi Daerah : melakukan pembinaan terhadap partai politik
9	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku	1	Urusan Otonomi Daerah : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan

	kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan		mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan antara lain melalui proses musrenbang dan pelaksanaan rebug warga.
		2	Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
10	Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	1	Urusan Otonomi Daerah : penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
		2	Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat
11	Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas)	1	Urusan Otonomi Daerah : Menyelenggarakan pelayanan prima di Kelurahan dan Kecamatan
		2	Urusan Otonomi Daerah : Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan publik
12	Peningkatan kapasitas aparaturnya sebagai garda terdepan pelayanan	1	Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan untuk membentuk karakter pelayanan publik
13	Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	1	Urusan Penanaman Modal : Membangun jaringan komunikasi perijinan investasi secara <i>online</i>
		2	Urusan Otonomi Daerah : Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		3	Urusan Otonomi Daerah : Menerapkan sistem informasi pelayanan publik
14	Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju Jakarta Pintar	1	Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) bagi peserta didik di sekolah negeri dan swasta serta pemberian Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) dengan Kartu Jakarta Pintar
		2	Urusan Pendidikan : Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di sekolah
		3	Urusan Pendidikan : Memberikan bantuan/hibah untuk pembangunan gedung sekolah swasta ataupun hibah <i>meubelair</i>
		4	Urusan Pendidikan : Meningkatkan daya tampung peserta didik
		5	Urusan Pendidikan : Meningkatkan sekolah yang berfungsi dengan baik

15	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	1	Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik melalui penyebaran sekolah-sekolah unggulan ke seluruh wilayah, dan melalui penyempurnaan sistem rayonisasi dan peningkatan karakter bagi kualitas didik
		2	Urusan Pendidikan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru
16	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta	1	Urusan Kesehatan : Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh ( <i>total coverage</i> ) bagi masyarakat melalui penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin dan rentan dengan Kartu Jakarta Sehat
		2	Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional dan rumah susun
		3	Urusan Kesehatan : Mengembangkan puskesmas rawat inap
		4	Urusan Kesehatan : Menambah kapasitas tempat tidur kelas tiga pada RSUD
		5	Urusan Kesehatan : Membentuk dan mengembangkan kelurahan siaga aktif
		6	Urusan Kesehatan : Menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di kelurahan
		7	Urusan Kesehatan : Meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS)
17	Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi	1	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : Meningkatkan pelayanan KB gratis
		2	Urusan Kependudukan : Membuat kajian pola mobilitas dan migrasi penduduk ke dalam dan ke luar Jakarta
		3	Urusan Sosial : Melakukan studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis, dan tuna wisma)